

# DIALOG STRATEGIS PAPUA DALAM MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA

## PAPUA STRATEGIC DIALOGUE IN PREVENTING THE NATIONAL DISINTEGRATION

Steve Rick Elson Mara<sup>1</sup>, Siswo Hadi Sumantri<sup>2</sup>, Bambang Wahyudi<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
(stevericelsmara@gmail.com, siswo\_32@yahoo.com, buangwahyu@gmail.com)

**Abstrak** – Konflik integrasi di provinsi Papua seakan tidak menemukan titik terang. Konflik ini menjadi salah satu konflik vertikal terlama yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 sebagai titik awal integrasi Papua ke dalam NKRI terus menjadi perdebatan diantara Pemerintah, Para peneliti, dan kelompok pro referendum. Dialog yang dianggap sebagai sebuah kata kunci untuk menemukan solusi penyelesaian konflik Papua pun masih menjadi sebuah pertentangan diantara pemerintah, peneliti dan kelompok pro referendum. pertemuan yang dilakukan antara pemerintah dan tim 100 perwakilan Papua pada tahun 1999 pun menuai pro dan kontra. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan rute perdamaian yang harus digunakan untuk penyelesaian konflik Papua yang didasarkan pada komunikasi strategis. Berdasarkan hal ini maka muncul pertanyaan masih perlukah dialog dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik Papua, dan rute perdamaian yang harus digunakan untuk menyelesaikan kasus Papua ini. Rumusan masalah dijawab dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian analisis data dan wawancara mendalam untuk menemukan data yang valid. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dialog Papua-Jakarta sudah tidak relevan untuk dilaksanakan karena akan mengancam kedaulatan bangsa. Rute penyelesaian konflik Papua yang selama ini dilakukan sudah harus direkonstruksi menjadi rute perdamaian integrasi dalam konteks dialog strategis yang memperhatikan visi dan misi negara dan wawasan kebangsaan, serta membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk mengkali sejarah masa lalu Papua dan melakukan pemetaan terhadap situasi.

**Kata kunci:** Konflik Papua, Dialog Strategis, Rute Perdamaian, Keamanan Nasional, Integrasi

**Abstract** - Conflict of integration in Papua province seems to not find a bright spot. This conflict has become one of the longest-running vertical conflicts in Indonesia. The implementation of the Determination of the People's Counterpart (PEPERA) in 1969 as a starting point for the integration of Papua into the Republic of Indonesia continued to be debated among the Government, Researchers, and pro-referendum groups. Dialogue which is considered as a keyword to find solutions to the Papua conflict resolution is still a contention between the government, researchers and pro-referendum groups. a meeting conducted between the government and a team of 100 Papuan representatives in 1999 also reaped the pros and cons. The purpose of this study is to find a peace route that must be used to resolve the Papua conflict based on strategic communication. Based on this, the question arises whether a dialogue is still needed to resolve the Papua conflict, and a peace route must be used to resolve the Papua case. The formulation of the problem is answered by using descriptive qualitative research methods with a focus on data analysis research and in-depth interviews to find valid data. The results obtained in this study indicate that the implementation of the Papua-Jakarta dialogue is

---

<sup>1</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

*no longer relevant to be carried out because it will threaten national sovereignty. The route to resolve the Papua conflict that has been carried out so far must be reconstructed into a route of integration peace in the context of a strategic dialogue that pays attention to the country's vision and mission and national insights, and forms a truth and reconciliation commission to explore Papua's past history and map the situation.*

**Keywords:** Papua Conflict, Strategic Dialogue, Peace Routes, National Security, Integration

## **Pendahuluan**

Setiap negara menyelenggarakan pemerintahan dan mempertahankan eksistensi sebagai sebuah negara dengan menerapkan sistem pertahanan. Sistem pertahanan dibutuhkan suatu negara untuk mempertahankan keutuhan negara. Faktor yang sangat mempengaruhi sistem pertahanan negara Indonesia adalah kondisi geografis, politik dalam dan luar negeri, kebudayaan, keadaan ekonomi, serta kondisi sosial suatu Negara.<sup>4</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pokok pikiran pertama yang berbunyi “*Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” artinya negara telah menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat

Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Sebagai dasar negara Indonesia, ideologi berfungsi untuk mempersatukan seluruh rakyat dan mempertebal kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi fondasi utama tercapainya tujuan nasional bangsa sehingga Pancasila selalu dipertahankan dalam kehidupan segenap bangsa.<sup>5</sup> Ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara guna menunjang suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai idealis yang memiliki sifat sistematis dan rasional dan bersifat menyeluruh, nilai normatif yaitu Pancasila dijabarkan dalam sistem norma sehingga tersirat nilai dalam norma

---

<sup>4</sup> Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan (Jakarta : Kementerian Pertahanan 2015)

<sup>5</sup> Panji Setiko. Pendidikan Pancasila (Jakarta : Gramedia Widiasarana 2015)

kenegaraan dan nilai realistik yaitu Pancasila mampu memberikan cerminan atas realitas hidup dan berkembang dalam penyelenggara negara. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila ini kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk di terapkan di Indonesia. Menguatnya Nasionalisme Kedaerahan atau Etnonasionalisme menjadi salah satu faktor yang mendukung disintegrasi bangsa. Etnonasionalisme menjadi populer di Indonesia setelah adanya kelompok pro referendum yang mendeklarasikan dirinya pada tanggal 1 desember 1961.<sup>6</sup>

Papua merupakan salah satu provinsi di timur Indonesia, yang secara astronomis terletak antara  $2^{\circ}25' - 9^{\circ}0'$  Lintang Selatan dan antara  $130^{\circ}0' - 141^{\circ}0'$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Papua memiliki batas-batas : Utara – Samudera Pasifik; Selatan – Laut Arafuru; Barat- Provinsi Papua Barat; Timur- Negara Papua Nugini. (Badan Pusat Statistik, 2016).<sup>7</sup> Luas pulau Papua mencapai 316.553.07 km<sup>2</sup> hal tersebut menjadikan pulau Papua sebagai pulau terluas di Indonesia. Secara Administratif

Papua terdiri 28 Kabupaten dan 1 Kota, yang terbagi di dalam 5 wilayah adat yaitu Mamta, Saireri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2015



**Gambar 1** Peta Pulau Papua

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2016

Penduduk di Papua berjumlah 3,15 Juta penduduk, yang terbagi atas laki-laki 1,66 Juta (52,68%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,49 juta (47,32%) dengan demikian maka rasio jenis kelamin pada tahun 2015 tersebut adalah 111,35.

Jumlah penduduk Papua terbanyak ada di Kota Jayapura yang mencapai 283,49 ribu jiwa atau 9% dari jumlah total

<sup>6</sup> Muridan Widjojo, Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik, *Jurnal Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia* ( Jakarta : 2011)

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, Papua Dalam Angkat ( Jayapura : BPS PAPUA, 2016)

penduduk Papua dan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 18,19 ribu jiwa dari total jumlah penduduk Papua. Dengan demikian, dengan wilayah yang luasnya mencapai 316.553,07 km<sup>2</sup> tersebut maka jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Papua masih rendah dengan perkiraan 10 penduduk akan mendiami tiap satu km<sup>2</sup> wilayah Papua.

Berdasarkan dinamika perpecahan yang terjadi di Indonesia, maka mulai timbul pemikiran perbedaan antar suku. Menurut Robin Osbon dalam tulisannya di majalah *Weko*, sebagian masyarakat Papua ada yang merasa bahwa Papua bukanlah Indonesia karena perbedaan ras dan kesamaan fisik masyarakat Papua dengan ras Melanesia membuat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia berkurang dan merasa bahwa masyarakat Papua lebih dekat ciri fisiknya kepada negara di pasifik seperti Papua New Guinea, Salomon Island, Fiji, dan Vanuatu.

Robin Usbon mengungkapkan bahwa Hal Ini merupakan satu alasan sebagian masyarakat Papua tidak mengakui hasil Penentuan Pendapat

Rakyat (Pepera). Pepera merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi Papua yang terjadi pada tahun 1969. Pepera dilaksanakan pada saat itu sebagai sebuah posisi tawar Papua yang saat itu bernama Irian Barat untuk menjadi satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pepera dihadiri oleh 1.025 orang anggota Dewan Masyarakat Papua, selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat serta kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat<sup>8</sup>.

Saat ini visi etnik digunakan untuk memandang berbagai hal maka orang atau kelompok tertentu akan lebih cenderung untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Hal ini merupakan bagian dari pandangan yang dianggap rasisme, sehingga beberapa kelompok beranggapan bahwa kebenaran akan suatu hal tidak bisa dipandang secara universal tetapi dipandang berdasarkan kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini disebut sebagai Etnosentrisme. Secara sederhana etnosentrisme dapat didefinisikan paham seseorang yang menilai kebudayaan lain menurut ukuran

---

<sup>8</sup> Robin Usbon, Masyarakat Papua Bukanlah Indonesia, (Papua : Majalah *Weko*, 2019)

yang berlaku pada kebudayaannya. Dalam hal ini dapat terlihat jelas bahwa Etnosentrisme dapat merusak semangat pluralisme dan multikulturalisme yang dibangun untuk mengikat Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Papua menjadi salah satu daerah yang berpotensi terlepas dari negara kesatuan karena keberadaan etnonasionalisme. Selain keabsahan pepera yang masih menjadi pokok perdebatan integrasi Papua, pemberlakuan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua seakan telah mengizinkan Papua untuk merdeka, bahkan jika otsus tersebut di tambah menjadi otsus plus kemerdekaan Papua seperti sudah mencapai 95%.<sup>9</sup> (Kompas, 2017) di mana rakyat membentuk pemerintahannya sendiri. Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, semenjak pemberlakuan Undang-undang ini terjadi peningkatan nasionalisme Kedaerahan Papua. Hal ini terbukti dengan menguatnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan *United Liberation Movement For West Papua* (ULMWP) yang berusaha untuk memisahkan Papua dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai strategi yang diterapkan kelompok tersebut.

Selain itu, semenjak otsus diterapkan di Papua pada tahun 2001 hingga tahun 2011 dinilai tidak membawa perubahan sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

---

<sup>9</sup> Demianus Idjie, "Otsus Plus, Kemerdekaan Papua 95%", dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/01/22/0843019/Otsus.Plus.95.Perser.Kemerdekaan.Wargapapua>, 22 Januari 2014, Diakses pada tanggal 28 September 2019

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus. Berdasarkan peraturan tersebut maka terbentuklah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yaitu lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kewenangan dari UP4B adalah melaksanakan koordinasi dengan pimpinan lembaga non-kementerian, pimpinan lembaga lain, dan kepala pemerintahan daerah dalam melaksanakan rencana aksi serta memonitor dan menyarankan penyelarasan program dan kegiatan serta memperbaiki seluruh kinerja yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu terjadi penolakan terhadap UP4B dan ketidakjelasan antara tugas UP4B dan tugas dari Pemerintah

Daerah hak tersebut menimbulkan ketidakjelasan tugas UP4B sehingga terjadi Disparitas.

Melalui Undang-undang 21 tahun 2001, pada pasal 46 telah menuntut pemerintah untuk membentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang salah satu tugasnya adalah mengklarifikasi catatan sejarah dengan harapan memperkuat integrasi negara.<sup>10</sup> Melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), komposisi dialog telah diusulkan yang melibatkan wakil pemerintah, masyarakat adat sertalembaga swadaya masyarakat. Dialog dianggap sebagai metode yang paling realistis untuk menyelesaikan masalah integrasi bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pada tanggal 09 November 2011 telah menyatakan bahwa, pemerintah siap berdialog secara terbuka dengan rakyat Papua<sup>11</sup>. Dialog pada awalnya masih menjadi sebuah kata yang tabu bagi pemerintah ketika membicarakan tentang masalah Papua demi integrasi bangsa, namun seiring berjalan waktu, dialog menjadi kata kunci dalam penyelesaian konflik disintegrasi

---

<sup>10</sup> Bernarda Materai, Nasionalisme Ganda Orang Asli Papua ( Jakarta : Kompas Media Nusantara 2012)

<sup>11</sup> Darmono, "Menakar Wacana Dialog", dalam <https://kolom.tempo.co/read/1243954/menakar-wacana-dialog-papua/full&view=ok>, 21 September 2019, diakses pada 19 Januari 2020

bangsa. Melalui Jaringan Damai Papua (JDP) yang dipimpin oleh Alm. Pater Neles Tebay pada saat itu telah melakukan upaya yang sangat signifikan untuk melakukan dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat atau organisasi yang terlibat langsung dalam proses tersebut. JDP melakukan sosialisasi terhadap rancangan dialog Papua-Jakarta kepada masyarakat Papua dan juga terhadap elit politik<sup>12</sup>.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan bahwa, kenapa dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh dapat berhasil namun dialog tersebut tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus Papua. Menurut Frans Pekey dalam buku Mencari Jalan Perdamaian untuk Papua bahwa ada 2 faktor utama kenapa pemerintah belum memberikan kepastian tentang dialog yang akan dilakukan: Faktor Traumatis, pada tanggal 29 Juni 1999, pemerintah pernah melakukan dialog Jakarta-Papua di bawah kepemimpinan B.J Habibie. Dialog yang dilaksanakan tersebut mempertemukan pemerintah dan rakyat Papua yang tergabung dalam Tim 100. Namun hasil yang didapatkan pada dialog tersebut adalah “Rakyat Papua

menghendaki dan meminta untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan jawaban dari B.J Habibie adalah “pulang dan renungkan itu kembali”, hal ini masih menjadi trauma masa lalu pemerintah bahwa ketika melaksanakan dialog maka hal yang sama yang akan kembali terjadi. Selanjutnya adalah Faktor Persepsi, terdapat banyak persepsi di antara masyarakat Papua sendiri, Komite Nasional Papua dan Papua Barat (KNPB) menolak dialog dan meminta referendum, hal tersebut juga diminta oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau yang sering menyebutkan kelompok mereka sebagai Tentara pembebasan Nasional/Organisasi Papua merdeka (TPN/OPM).

Berbagai kepentingan mewarnai status politik Papua namun berdasarkan laporan dari kementerian luar negeri bahwa hasil pertemuan antara wakil Indonesia dan sekjend PBB pada 10 september 2019 di New York telah membahas dan situasi dan status Papua dari sudut pandang PBB yaitu Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan resolusi PBB 2504 tentang

---

<sup>12</sup> Indonesian Institute of Science (LIPI), Papua Peace Land, *Jurnal The Campaign For Papua Peace Network*, 2001. Vol. 21

penentuan pendapat rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun 1969 dan menghasilkan Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat (PEPERA).

Namun, disisi lain beberapa cendekiawan Papua memiliki persepsi berbeda yaitu untuk menuju Papua damai perlu dilakukan diplomasi dalam sebuah meja perundingan atau dialog dua arah antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian “Dialog Strategis Papua untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa” sebagai sebuah pendekatan baru yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian relevansi dialog dan Bagaimana Rute Perdamaian di Papua yang sedang digunakan dan harus digunakan untuk menjaga keamanan nasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang

dapat diamati. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan karena terjadi perubahan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mencari data dengan melihat fenomena yang terjadi dilapangan serta histori masa lalu yang dapat dianalisa kembali untuk kepentingan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan di perkuat dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapabilitas untuk memberikan data yang valid. Penelitian studi kasus ini dianggap sebagai metodologi tepat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang masalah integrasi yang terjadi di Papua.

### **Komunikasi Strategis**

Komunikasi menurut Brent D. Ruben merupakan suatu proses melalui individu dalam hubungannya dengan kelompok dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirim, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan lingkungan dengan orang lain. Komunikasi Strategis adalah dukungan kepada strategi nasional dengan elemen penting yang terdiri dari tindakan terkoordinir, pesan, gambar, serta bentuk lainnya dari penyampaian sinyal atau keterkaitan yang ditujukan

---

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta 2015)

untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mempersuasi khalayak tertentu untuk mendukung kepentingan nasional.<sup>14</sup>

Komunikasi strategis digunakan sebagai usaha untuk memastikan sebuah informasi yang ditransfer dari atasan kepada bawahan atau dari pihak tertentu kepada pihak yang saling memiliki keterikatan untuk membangun sebuah hubungan atau jaringan komunikasi. Konsep strategis yang dimaksud adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan sistem pendekatan dan pengembangan yang menggunakan keterampilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi strategis merupakan bagian dari komunikasi antar organisasi yang menampilkan dirinya untuk membahas isu-isu terkini di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Secara sederhana dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara komunikasi dan komunikasi strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari poin-poin prinsip yang menjelaskan tentang pemahaman komunikasi

strategis tersebut. Menurut Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat poin prinsip tersebut dapat membantu dialog serta dapat mengarahkan komunikasi strategis dilakukan. Prinsip tersebut terbagi atas beberapa bagian, yaitu (Commander Handbook: 2010)<sup>16</sup> :

Bagian Pertama ialah kepemimpinan (Leadership-Driven). Kepemimpinan ini merupakan sebuah peran yang berada pada posisi teratas dan menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus secara tegas dan aktif dalam mendorong proses dari sebuah komunikasi strategis. Pemimpin yang menempati posisi tersebut untuk memastikan sebuah integrasi dalam komunikasi menjadi inti dari keseluruhan yang dilakukan dalam sebuah komunikasi strategis. Hal ini dikarenakan sebuah kesuksesan dari komunikasi strategis didasarkan pada integrasi tindakan, kata-kata, dan gambar yang dimulai dari sebuah kepemimpinan yang jelas.

Bagian Kedua ialah kredibilitas dan konsistensi. Hal ini merupakan sebuah

---

<sup>14</sup> Paul Christopher. *Strategic Communication : Origins, Concepts and Current Debates*. (Santa Barbara: Praeger 2012).

<sup>15</sup> Kirsk Hallahan, Derina Holtzhausen, Betteke van Ruler, Dejan Verticic, and Krishnamurthy Sriramesh. "Defining Strategic Communication", *International Journal of Strategic Communication* 2007. hlm.3-35

<sup>16</sup> Commander's Handbook, *Strategic Communication and Communication Strategic* version 3.0 US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center. (A-1)-(A-3) (2010)

dasar dari komunikasi yang efektif. Kedua hal tersebut digunakan sebagai bangunan untuk melaksanakan sebuah tindakan, kata-kata, dan gambar yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan secara internal maupun eksternal. Kredibilitas menjadi sangat penting dalam komunikasi dengan orang lain, karena dengan kredibilitas seseorang dapat lebih dipercaya.

Bagian Ketiga ialah memahami sikap, budaya, identitas, perilaku, sejarah, perspektif, dan sistem sosial. Dalam poin ini dikatakan bahwa “*what we say, do or show, may not be what others hear or see*”, berarti bahwa apa yang kita lakukan akan membentuk sebuah persepsi terhadap orang terhadap tindakan yang dilakukan. Selain itu, harus dipahami bahwa konsep dari nilai moral bukanlah sebuah nilai yang mutlak, tetapi sebuah relatif terhadap rencana sosial dan budaya individu. Para pendengar akan menentukan arti dengan menginterpretasi komunikasi kelompok mereka dengan kelompok lain, sehingga apapun yang dilakukan atau ditunjukkan kepada mereka, mungkin tidak akan sama seperti apa yang mereka lihat atau dengar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang atau kelompoknya bertindak tanpa memahami kelompok lain yang

melihat maka dapat menyebabkan kesalahpahaman kritis dengan konsekuensi serius.

Bagian keempat ialah membangun dialog dalam beraneka segi untuk menyesuaikan pemahaman dan hubungan. Komunikasi yang efektif memerlukan sebuah dialog antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan respon dari masing-masing pihak baik yang mendengar, dan yang terlibat dalam sebuah dialog. Jika dialog dari berbagai segi ini dilakukan maka akan terarah pada sebuah proses pembangunan kepercayaan. Demikian, seorang pemimpin dalam kelompok dapat mengambil keuntungan dalam hubungan ini untuk menempatkan kebijakan dan tindakan dalam konteks sebelum terjadinya sebuah peristiwa

Bagian Kelima ialah meresapi (*pervasive*) setiap tindakan, gambar dan kata-kata yang mengirimkan sebuah pesan. Dalam tahapan kelima ini sebuah komunikasi sudah tidak terkotak dalam ruang dan waktu, sehingga semua aktor adalah komunikator. Dalam tahapan ini akan ditemukan pihak-pihak yang tidak diinginkan namun hal tersebut tidak dapat dihindari dalam lingkungan komunikasi strategis. Meresapi ini

merupakan hal yang perlu di perhatikan dan dicermati.

Bagian Keenam ialah kesatuan usaha (*Unity of Effort*), merupakan sebuah keterpaduan secara vertikal dan horisontal. Komunikasi strategis bersifat lebih konsisten sehingga proses kolaborasi harus terintegrasi secara vertikal dan horisontal di pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh ialah hasil (*result*), merupakan sebuah tindakan yang berbasis untuk mendapatkan hasil tertentu dalam mengejar sebuah tujuan akhir dari komunikasi strategis yang diartikulasikan dengan baik. Komunikasi strategis ini harus difokuskan pada pencapaian hasil yang diinginkan dalam mengejar sebuah hasil akhir yang jelas.

Bagian Kedelapan ialah tanggap (*responsive*) yang tepat, memberikan pesan yang tepat, waktu yang tepat dan tempat yang tepat terhadap kondisi yang berkembang memungkinkan memiliki efek strategis. Dengan tanggap yang dimiliki oleh pihak-pihak maka akan lebih menyalurkan tindakan, kata-kata, dan gambar untuk mendukung tujuan komunikasi strategis.

Bagian Kesembilan ialah berkelanjutan (*continous*) merupakan prinsip yang dimiliki oleh komunikasi

strategis yang melakukan suatu penelitian dan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang berkesinambungan. Prinsip dapat menunjukkan keberhasilan proses komunikasi dengan analisis yang rajin dan terus-menerus hingga memberi masukan terhadap penilai tersebut. Hal ini juga mendukung tujuan dari setiap kelompok yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi.

Dalam teori Komunikasi strategis yang disampaikan oleh ahli komunikasi Niswa Ashraf terdapat sembilan tahapan rencana strategi yang digunakan sebagai langkah penyusunan strategi sejak pemetaan situasi hingga implementasi. Penulis menggunakan teori komunikasi strategis sembilan langkah yang disampaikan oleh Niswa Ashraf dan diterbitkan oleh Melcrum (*global research and training for internal communicators*).

Sembilan langkah rencana strategis dalam komunikasi strategis yang diperkenalkan oleh Nishwa Ashraf, antara lain :

1. Memetakan Situasi (*Mapping the Situation*)
2. Berbicara dengan pemangku kepentingan kunci (*talk to key stakeholder*)

3. Visi masa depan negara (future state vision)
4. Prioritas Elemen Visi (prioritize vision element)
5. Mengembangkan tujuan yang memungkinkan untuk dilaksanakan (develop actionable objective)
6. Mengembangkan dan menyusun prioritas strategi dan taktik (develop and prioritize strategies and tactics).
7. Menentukan ukuran, lini waktu, dan tanggung jawab (define metrics, timeline, and responsibilities)
8. Mengembangkan rencana strategis dan taktis (develop strategic and tactical plans)
9. Implementasi dan Kelanjutannya (implementation and beyond)

Peneliti memilih sembilan langkah perencanaan strategis ini sebagai landasan teoritis pada penelitian didasarkan pada kesesuaian, menyeluruh, dan kesinambungan dari langkah-langkah tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Teori komunikasi ini terdiri dari sembilan langkah, tetapi penulis memilih empat sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mempersiapkan dialog sebagai komunikasi strategis sebagai resolusi konflik disintegrasi bangsa, yaitu :

Pemetaan Situasi, Berbicara dengan Pemangku kepentingan, Visi dan Misi masa depan negara, dan Mengembangkan Rencana Strategis dan Taktis.

1. Pemetaan Situasi (*Mapping the situation*)

Tahapan ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah melakukan langkah pemetaan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Teknik ini dilakukan untuk memilah masalah yang terjadi di Papua sehingga dapat diketahui posisi tawar pemerintah dalam melakukan pembangunan komunikasi strategis di Papua serta dapat melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi. Melalui tahapan awal ini diharapkan strategi yang disusun dapat lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu integrasi bangsa Indonesia.

2. Berbicara dengan Pemangku Kepentingan (*Talk to key stakeholder*)

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tingkat nasional perlu melakukan komunikasi mengenai permasalahan yang terjadi di

Papua bersama dengan pemangku kepentingan tingkat daerah dan pemimpin organisasi terkait. Hal ini sebagai komunikasi awal yang harus dilakukan untuk merumuskan sebuah langkah strategis yang perlu dilakukan dalam penyelesaian masalah serta siapa yang melakukannya hingga batas waktu yang ditentukan.

3. Visi dan Misi Masa Depan Negara  
Tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar bahwa negara Indonesia memiliki visi bangsa “menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, beradil, adil, dan makmur. Melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan yang mencoba untuk memecah belah negara“. Komunikasi strategis yang dilakukan harus memperhatikan visi bangsa agar tetap menjaga keutuhan negara.
4. Mengembangkan Rencana Strategis dan Taktis (*Develop Strategic And Tactical Plans*)  
Dalam tahapan ini akan dibahas mengenai bagaimana aktor antara Pemerintah dan kelompok masyarakat seperti Organisasi Papua Merdeka, Komite Nasional

Papua Barat, dan *United Liberation Movement For West Papua* dalam melakukan komunikasi strategis dan taktis dalam tahapan penyelesaian konflik disintegrasi bangsa di Papua. Menjadi perhatian khusus bahwa dalam melakukan komunikasi strategis perlu diperhatikan kepentingan nasional, sehingga tahapan penyusunan tahapan komunikasi strategis dapat sesuai dengan tujuan nasional.

Selanjutnya dalam komunikasi strategis tersebut, peneliti berharap akan dilaksanakannya diplomasi. Diplomasi merupakan satu Instrumen penting dalam sebuah negara, terutama dalam pelaksanaannya dalam mencapai kepentingan nasional negara Indonesia. Menurut *Oxford English Dictionary*, “*Diplomacy is the management of international relation by negotiation; method by which these relations are adjusted and manage by ambassadors and envoys; the bussines or art of the diplomat*’, Sehingga secara garis besar diplomasi adalah seni dalam mengelola hubungan internasional dan salah satu caranya adalah melalui negosiasi dan sebagai sebuah hubungan relasi atau

hubungan, komunikasi. Namun dalam penelitian ini, penulis menawarkan sebuah konsep diplomasi dalam negeri yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk diplomasi perdamaian. Diplomasi perdamaian ini disebut Ichsan Malik sebagai sebuah inisiatif pemerintah pusat untuk menyelesaikan sebuah kasus. Diplomasi Perdamaian ini dapat dilakukan dengan bentuk rekonsiliasi.

Sembilan faktor yang dapat dijadikan indikator untuk mengenali suatu proses rekonsiliasi, yaitu (Malik, I. 2017):

- a. Visi yang kuat untuk masa depan
- b. Membangun sistem hukum
- c. Partisipasi kelompok masyarakat sipil
- d. Penggunaan atribut/cara lokal
- e. Leadership
- f. Kampanye media
- g. Berfokus pada korban
- h. Workshop kritis
- i. Pengguna Fasilitator

Diplomasi perdamaian tersebut dilakukan dengan konsep diplomasi pertahanan. Menurut Pedrason (2015) diplomasi pertahanan digunakan sebagai instrumen pertahanan negara untuk

mewujudkan kepentingan nasional dan secara tradisional diplomasi ini digunakan sebagai alat kebijakan pertahanan dan keamanan dalam suatu negara. selanjutnya yang menjadi dimensi utama dalam diplomasi pertahanan adalah membangun kerjasama antar pihak yang sebelumnya menjadi lawan dan pihak yang berpotensi menjadi lawan untuk menghilangkan ketidakpercayaan

### **Dialog**

Dialog menurut Ronald J Fisher dipahami sebagai sebuah pertukaran dan diskusi mengenai ide-ide yang disampaikan secara jujur dan terbuka sebagai pranata untuk menuju hubungan yang harmonis dan kesepahaman.<sup>17</sup> Sehingga dalam dialog setiap pihak dituntut untuk berperilaku sesuai dengan landasan seperti yang di ungkapkan oleh William Isaacs (1999), yaitu:

- a. Penyampaian (*Voicing*)

Setiap pihak dalam dialog diminta untuk menyampaikan ide atau gagasan secara jujur dan dilandaskan sesuai dengan otoritas pihak tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

---

<sup>17</sup> Frans Pekey, Papua Mencari Jalan Perdamaian, Telah Resolusi Konflik di Bumi Cenderawasih (Jakarta : Gramedia 2018)

b. Mendengarkan (*Listening*)

Semua pihak yang berdialog dituntut untuk mendengarkan tanpa melakukan sangahan atau bantahan dalam ruang dialog. Setiap pihak harus menghargai pihak lain pada saat mengungkapkan ide dan gagasannya dan tidak melakukan interupsi pada penyampaian ide.

c. Respek (*respecting*)

Memberikan respek kepada pihak lain dengan kesadaran dan pengenalan dari integritas.

d. *Suspending*

Memegang semua asumsi yang disampaikan, serta setiap keputusan yang penentuan yang telah disepakati. Hal ini dilakukan agar proses dialog dapat berjalan dengan baik.

Dalam sebuah dialog komunikasi memiliki posisi sebagai mekanisme, berarti bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam sebuah dialog, dengan kata lain dialog tidak bisa terjadi jika tidak ada komunikasi. Terdapat beberapa jenis dialog yang disampaikan oleh Jay Rotman (Sudira:2011, hlm 223), yaitu :

- a. *Position dialog*, ini merupakan dialog yang dilakukan sebagai langkah untuk menentukan posisi.

Para pihak yang berkonflik akan bertemu dan saling memberikan pandangan bersama dengan fasilitasi. Pembicaraan dalam tahapan ini dilakukan dengan berhadap-hadapan sehingga berada dalam sebuah posisi tawar-menawar. Namun, dari tawar-menawar tersebut munculah sebuah perbedaan akan dijadikan substantif identifikasi dari konflik.

- b. *Human Relation Dialog*, para pihak yang berkonflik akan difasilitasi untuk memberikan pikiran mereka mengenai konflik dan hubungan dengan yang lainnya. Dalam dialog ini, para pihak harus melepas semua stereotype, hal ini dapat didorong dengan pembangunan kesadaran akan sebuah hubungan bahwa kita merupakan bagian dari orang lain atau orang lain merupakan bagian dari diri kita. Tujuan dari dialog ini adalah untuk membangun sebuah kesepahaman antara para pihak serta rasa saling menghargai, dengan demikian setiap konflik yang dimiliki oleh para pihak dapat dipahami

Dialog ini merupakan dialog penentuan langkah ke depan. Dalam dialog ini sudah ditemukan

sebuah langkah kedepan yang sudah melewati tahapan seleksi. Kemudian ini bertujuan tidak hanya menjadi pembicaraa dan pemahaman, tetapi sudah pada tingkat yang saling bekerjasama dengan bagaimana memberikan bantuan.

- c. *Problem Solving dialogue*, pihak yang berkonflik mengorganisasi komunikasi mereka sendiri secara baik sehingga dapat menuju pada substansi apa sesungguhnya yang membuat orang berkonflik.

Dialog ini kemudian akan menjadi sebuah model dalam pembangunan komunikasi disetiap pelaksanaan program pemerintah dan proses menuju damai yang digalang oleh pemerintah melalui dialog damai. Selanjutnya melalui teori dialog ini juga dapat digunakan sebagai model dalam melaksanakan sosial dialog yang ditawarkan oleh peneliti sebagai resolusi konflik disintegrasi bangsa.

### **Hasil dan Pembahasan Dialog Papua dalam Konteks Komunikasi Strategis dan Relevansinya**

Komunikasi sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi masyarakat dengan sesama organisasi masyarakat atau dengan

elemen lain dilakukan untuk mengirim informasi agar terjadi kesamaan pandang pada suat hal. Namun dalam konteks komunikasi strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan sebagai dukungan kepada strategi nasinal dan elemen penting lainnya yang dilakukan secara terkoordinir untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan juga mempengaruhi khalayak tertentu untuk mendukung kepentingan nasional.

Strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan sistem pesan kepada masyarakat di Papua dengan pola pendekatan yang komunikatif. Sehingga komunikasi dalam penelitian ini menunjukan dirinya sebagai konsep yang akan membahas isu terkini yang berada di dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat Papua. Dalam pemahaman komunikasi strategis maka pemahamannya akan diarahkan pada konsep dialog yang dapat mengarahkan komunikasi strategis tersebut dilakukan di Papua.

### **Prinsip Komunikasi Strategi dan Realitanya di Papua**

#### **a. Kepemimpinan**

Dalam prinsip kepemimpinan ini maka ada sebuah pola yang digunakan yaitu peran orang yang berada di posisi teratas. Bentuk komunikasi yang dibangun selama oleh pemerintah Indonesia adalah komunikasi yang berasal dari posisi teratas yaitu Presiden Indonesia. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo telah menyampaikan kepada kementerian lembaga terkait agar terus membangun dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Bapak Susilo menyampaikan bahwa perlu adanya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah RI dan Papua yang disebut dengan dialog Papua-Jakarta namun hal tersebut sampai saat ini belum dilakukan karena menurut beberapa penelitian terdahulu bahwa pemerintah pusat masih menyimpan traumatis atas hasil dialog yang dilaksanakan pada tahun 1999.

Presiden Joko Widodo bersama kementerian lembaga dalam periode kepemimpinan saat ini juga mengatakan bahwa telah melakukan dialog dengan masyarakat, yaitu dialog tatap muka yang dilakukan secara langsung dengan masyarakat. Hal tersebut sering dilakukan bahkan

pemerintah mengklaim bahwa kedatangan 13 kali Presiden ke Papua merupakan dialog. Selain itu, Kehadiran tokoh Papua ke Istana Presiden merupakan dialog. Namun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia membantah itu bahwa itu bukanlah dialog.

*“Kedatangan Presiden ke Papua, pertemuan dengan masyarakat itu bukan dialog. Dialog itu bukan kunjungan, dialog itu duduk bersama dalam satu meja dan tidak ada batasan untuk menyampaikan yang ingin didialogkan”.* (Adriana Elizabeth, 2019)

Menurut LIPI, yang dilakukan di Papua semenjak tahun 1969 yaitu dialog penentuan pendapat rakyat. Namun pertemuan tim 100 dan presiden pada 1999 bukanlah dialog itu hanyalah pertemuan yang menghasilkan kebijakan untuk tanah Papua, sampai saat ini belum ada dialog yang dilakukan. Pertemuan Presiden dengan masyarakat dan para tokoh bukanlah sebuah dialog hanyalah sebuah kunjungan kerja Presiden.

#### **b. Kredibilitas dan Konsistensi**

Kredibilitas dan konsistensi menjadi sebuah bagian penting untuk menjadi dasar dari komunikasi yang efektif.

Komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah dengan masyarakat Papua dianggap cukup efektif oleh beberapa pihak karena beberapa kali pemerintah membangun dialog dan hasilnya adalah pembangun infrastruktur yang di bangun di pedalaman Papua. Namun, dari sisi lain komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang tidak efektif karena tidak menyentuh akar persoalan masyarakat Papua dan kebutuhan utama masyarakat Papua.

Hal ini terlihat ketika, pembangunan jalan dikabupaten Nduga yang telah mengorbankan 31 orang akibat serangan organisasi Papua Merdeka. Ini berarti bahwa ada yang salah dalam komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat Papua. Apakah pembangunan jalan tersebut bernilai kebutuhan kepada masyarakat? Ataukah pembangunan tersebut menjadi sebuah pencitraan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Papua.

### **c. Sikap, Budaya, Identitas, Perilaku, Sejarah, Perspektif, dan Sistem Sosial**

Dalam prinsip ini maka akan memunculkan sebuah persepsi bahwa apa yang yang dilakukan akan

membentuk opini orang lain tentang kelompok tersebut. Dalam membangun sebuah narasi integrasi dalam sebuah wilayah seperti Papua tentunya harus dilihat dari berbagai perspektif. Dalam pendekatan yang selama ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa menjadi sebuah poin bahwa negara memang serius untuk membangun Papua dan menjaga integrasi Papua dalam wilayah kesatuan. Namun, disisi lain masyarakat masih menentang kehadiran negara karena negara sering hadir dengan wajah militer (TNI) sehingga sebagian masyarakat trauma dengan pendekatan masa lalu yang pernah dilakukan).

Selain itu, pendekatan kekerasan yang sering dilakukan di era otsus ini menjadi salah satu titik tolak kenapa masyarakat tidak percaya tentang keseriusan negara dalam membangun Papua. Disisi lain, pemerintah juga memiliki perspektif sendiri dengan memberikan pelebelan kepada kelompok tertentu yang sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebagai separatis. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang menimbulkan konflik dalam alasan perspektif dan identitas ini.

#### **d. Membangun Dialog Beraneka Segi**

Dalam membangun komunikasi yang efektif membutuhkan dialog dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan bagian dari komunikasi pihak-pihak yang akan terlibat. Dalam pandangan pemerintah, saat ini pemerintah sedang melakukan dialog dengan berbagai tingkatan masyarakat Papua melalui Kepala Suku/Ke-Ondoafian untuk mengetahui tentang apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah juga membangun komunikasi dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Namun, ternyata di Papua bukan hanya ada kelompok yang mau mendengar dan berkomunikasi dengan pemerintah. Kelompok lain seperti kelompok pro referendum KNPB, ULMWP, AMP, dan OPM tidak ingin melakukan komunikasi dengan pemerintah karena persepektif yang berbeda. Kelompok pro referendum tidak ingin melakukan komunikasi yang bersifat membangun Papua karena menurut mereka membangun Papua dalam konteks pemerintah sama saja membuka akses untuk

pemerintah melakukan tindakan menguasai Papua.

Hal lain ditunjukkan oleh LIPI yang terus mengupayakan untuk dilakukan dialog internal Papua untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. LIPI terus mengupayakan untuk dilakukan dialog Papua dengan tahapan yang dilakukan oleh LIPI seperti Serap Aspirasi Masyarakat. Dialog ini menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Namun, terlihat bahwa masih ada perbedaan pandangan antara pemerintah, peneliti atau akademisi dan masyarakat mengenai dialog beraneka segi.

#### **e. Meresapi Tindakan**

Semua pihak dalam prinsip ini adalah komunikator sehingga akan ditemukan pihak-pihak yang dapat dihindari dalam lingkungan strategis. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah pada saat pelaksanaan komunikasi yang disebut pemerintah sebagai dialog 1999. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Papua diwakili oleh Tim 100 yang membawa aspirasi masyarakat Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa tim 100 ini adalah 100 komunikator yang tidak bisa

dihindari dalam lingkungan strategis. Dalam komunikasi tersebut lahirlah sebuah gagasan untuk melakukan referendum atau penentuan nasib masyarakat Papua melalui one man one vote. Komunikasi tersebut tidak bisa dihindari dalam komunikasi karena dalam dialog tentunya tidak semua yang hadir akan memiliki satu pandangan.

Hal ini menjadi sebuah efek traumatis bagi pemerintah ketika ingin melakukan dialog lagi karena jika dalam era dengan keterbukaan informasi seperti saat ini jika dilakukan dialog dan muncul wacana referendum maka akan menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan visi dan misi negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **f. Kesatuan Usaha**

Dalam prinsip kesatuan usaha ini menunjukkan harus adanya sebuah keterpaduan secara vertikal dan horisontal. Dalam konteks dialog yang peneliti melihat belum ada keterpaduan secara vertikal dan horisontal, artinya bahwa masing-masing kelompok masih berdiri dengan prinsip mereka terhadap dialog. LIPI melihat dialog sebagai

sebuah sarana untuk menuju Papua tanah Damai, Kemekopolhukam menerjemahkan dialog antara Papua-Jakarta sebagai sarana integrasi bangsa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui kunjungan-kunjungan dan pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat. Selain itu, dengan gaya Presiden Joko Widodo yang blusukan langsung ke masyarakat dianggap sebagai sebuah dialog langsung antara masyarakat.

Di sisi lain, Organisasi pro referendum melihat dialog sebagai jalan untuk melakukan referendum bagi bangsa Papua barat. Hal ini dikemukakan oleh Ketua KNPB dalam wawancara bersama peneliti bahwa KNPB hanya akan melakukan dialog jika arah dari dialog tersebut adalah membuka sejarah masa lalu Papua dalam NKRI dan membicarakan tentang tahapan referendum yang akan dilakukan. Dari ketika kelompok ini menunjukkan tidak ada keterpaduan atau kesatuan usaha dalam pemahaman tentang dialog yang ingin dilakukan.

#### **g. Hasil yang Diharapkan**

Tindakan untuk mendapatkan hasil tertentu dalam sebuah tujuan. Dalam

perjalanannya hasil akhir yang ditujuh oleh masing-masing pihak dalam konflik integrasi di Papua berbeda. Pemerintah datang dalam sebuah capaian yang ingin dicapai bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan Papua tidak akan pernah lepas satu sentipun dari NKRI. hal ini berbeda dengan yang diinginkan oleh kelompok referendum bahwa hasil dalam sebuah komunikasi strategis ini adalah pelaksanaan referendum atau penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Papua.

Disisi lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menginginkan sebuah hasil yang menurut LIPI lebih penting yaitu Papua Tanah Damai. Jika melalui komunikasi ini menghadirkan hal integrasi atau disintegrasi maka poinnya adalah Papua harus menjadi tanah damai. Namun, LIPI sebagai lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah juga tetap akan berada posisinya bahwa menjaga Integritas merupakan bagian dari tugasnya, hal ini disampaikan oleh Adriana Elizabeth dalam penelitian bahwa LIPI Pro NKRI namun tidak pro terhadap tindakan yang pernah dilakukan dan atau sedang dilakukan untuk menempatkan

masyarakat Papua sebagai warga kelas dua di daerahnya sendiri.

#### **h. Respon yang Tepat**

Dalam pandangan pemerintah bahwa komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat secara langsung merupakan hal baik yang dilakukan agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk segala konflik yang terjadi di Papua. Hal ini berbeda dengan tanggapan sebagian kelompok masyarakat bahwa pemerintah memang memberikan respon bagi permasalahan yang selama ini terjadi di Papua. Namun, hal tersebut tidak tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Papua.

*“Kita bangun infrastruktur di Papua dengan mewah tetapi mobil yang lewat juga hanya satu dua mobil dalam sehari juga mau ngapain, tidak ada arti apa-apa, kita hanya buang-buang anggaran di hutan belantara saja, Yang hari ini masyarakat Papua butuh untuk diselesaikan pemerintahan Presiden Jokowi adalah menuntaskan masalah kemanusiaan pelanggaran HAM “Rekonsiliasinya seperti apa, ini yang paling utama”. (Yan Mandenas, Anggota DPR RI, 2019)*

Pembangunan bandara, jembatan, jalan, gedung-gedung megah lainnya bukanlah menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut di tanggapi sebagai respon

yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Masalah Papua adalah masalah sejarah yang tidak sesuai dengan realita sehingga respon yang harus dilakukan pemerintah untuk menjawab setiap persoalan di Papua adalah meluruskan sejarah Papua dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua.

Sedangkan, pemerintah melihat hal tersebut sebagai sebuah kondisi yang tepat, yang di ambil setelah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Respon pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah karena pemerintah melihat masyarakat yang sulit membawa hasil kebun untuk di jual dikota. Pemerintah membangun jembatan untuk menghubungkan masyarakat di daerah tertentu agar lebih mudah mengakses pasar. Pemerintah membangun bandara untuk memudahkan pengiriman-pengiriman barang dari luar daerah khususnya di daerah pegunungan yang penggunaan transportasi udara adalah jalan satu-satunya untuk sampai disana.

*“Jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan*

*orang meningkat”.* (Joko Widodo, Presiden Indonesia, 2018)

Namun, dari kelompok masyarakat tertentu kembali menolak hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan transmigrasi besar-besaran masyarakat dari luar daerah Papua untuk menjajah tanah Papua dengan segala kekayaannya. Hal ini yang menyebabkan respon yang tepat selalu mendapatkan pertentangan dari masing-masing pihak.

#### **i. Komunikaasi yang Berkelanjutan**

Jika dilihat dari komunikasi yang di bangun oleh Presiden Indonesia yang dimulai semenjak pertama kali datang ke Indonesia dalam natal bersama masyarakat Papua dan dilanjutkan dengan kedatangan presiden hingga ke 13 kalinya di Papua maka dapat dikatakan bahwa pemerintah sedang membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat Papua. Hal yang sama juga dilakukan oleh kementrian lembaga terkait dalam instruksi presiden bahwa Papua harus menjadi perhatian pembangunan. Selama ini pembangunan di fokuskan hanya kepada Jawa atau Jawasentris namun saat ini polla tersebut sudah harus

dirubah, pola tersebut harus dirubah menjadi pembangunan Indonesia sentris dan pembangunan akan dilakukan dari ujung Timur Indonesia.

Wacana pembangunan Istana Kepresiden di Papua juga menjadi salah satu keseriusan pemerintah untuk terus membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat Papua. Sehingga jika presiden datang ke Papua tidak disebutkan Presiden Indonesia melakukan kunjungan ke Papua tetapi Presiden Indonesia pulang ke Papua. Papua menjadi rumah untuk Presiden dan bukan hanya menjadi daerah untuk dikunjungi.

Namun, di sisi lain dapat kita lihat bahwa organisasi pro referendum tidak ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan jika komunikasi tersebut tidak berada pada titik apa yang diinginkan oleh organisasi pro referendum bahwa komunikasi berkelanjutan yang harus dilakukan adalah komunikasi untuk pelaksanaan referendum.

*“Kami tidak hadir, kami mewakili suara orang papua, kami berada di atas dasar masalah, kami tidak bermain dengan korban rakyat papua yang mati dan kami juga tidak bisa menghadiri pertemuan yang kami tahu bahwa tidak akan pernah menyelesaikan konflik*

*Papua. Jadi kami tidak akan pernah hadir dan walaupun kami akan hadir ketika perundingan dengan Indonesia dan papua itu dilakukan. Disitulah kami akan tahu tentang draft referendum sebagai materi yang harus dirundingkan atau dibicarakan untuk disetujui dan dilaksanakan di Papua”.* (Viktor Yeimo, Ketua KNPB, 2019)

### **Relevansi Dialog dalam kajian Komunikasi Strategis**

Papua menjadi salah satu daerah terjadinya konflik vertikal terlama di Indonesia. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang juga pernah mengalami kasus serupa yaitu selama 29 tahun semenjak tahun 1976 dan berakhir tahun 2005 dengan perjanjian Helsinki dan konflik Timur Leste selama 24 tahun yaitu tahun 1975 hingga tahun 1999 dan berakhir dengan kemerdekaan Timur Leste.

Konflik Papua menjadi sangat menarik dan disebutkan sebagai salah satu isu seksi yang karena dibahas hangat oleh kalangan untuk mencari metode atau resolusi yang tepat untuk Papua. Dialog menjadi sebuah penawaran besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Indonesia. Salah satu kesepakatan damai melalui dialog yang pernah dilakukan Indonesia adalah Perdamaian Aceh, sehingga banyak pihak yang menyatakan bahwa Dialog juga harus dilakukan di Papua untuk menyelesaikan

kasus Papua atau sering dibahasakan selesaikan Papua dengan cara Aceh.

Namun, dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan oleh peneliti bahwa makna dari dialog ini masih mendapatkan banyak tafsiran dari pihak yang berkepentingan dalam dialog. Pemerintah, peneliti atau akademisi, dan organisasi pro referendum masih memaknai dialog dengan tafsiran yang berbeda.

Dari pihak pemerintah yaitu Kemenkopolhukam melihat dialog sebagai sebuah komunikasi konstruktif yang bersifat substansial dan simbolik. Komunikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk penyelesaian permasalahan Papua secara menyeluruh dan juga untuk menguatkan eksistensi pemerintah di Papua serta menguatkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia. Komunikasi ini seharusnya melibatkan masyarakat Papua yang berada di Papua dan diluar Papua, masyarakat Papua dan non Papua yang tinggal di Papua, pemerintah daerah, pengusaha atau investor, TNI dan Polri, TPN/OPN dan masyarakat Papua di luar negeri. Namun, selama ini komunikasi dilakukan lebih banyak dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pembahasan yang lebih

diarahkan pada prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Papua. Dengan gaya Presiden Indonesia Joko Widodo yang blusukan, Pemerintah telah mengklaim bahwa kedatangan Presiden 13 kali ke Papua merupakan dialog. Pertemuan dan tatap muka yang dilakukan dengan masyarakat Papua merupakan dialog secara langsung untuk mendapatkan jawaban langsung kebutuhan masyarakat Papua. Selain itu, Kemenkopolhukam juga melihat bahwa pertemuan presiden dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda yang dilakukan di istana negara merupakan bagian dari dialog yang dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban langsung.

Hal ini bertolak belakang dengan pemahaman lembaga ilmu pengetahuan Indonesia mengenai dialog. Dialog dipahami LIPI lebih kepada dialog internal Papua terlebih dahulu lalu melangkah ke dialog Papua-Jakarta. Dialog internal yang dimaksudkan oleh LIPI adalah dialog Papua Tanah Damai. Hal ini disebutkan LIPI sebagai sebuah metode yang penting untuk mencari solusi penyelesaian konflik di Papua. LIPI menyebutkan dialog internal ini dengan penyebutan dialeg Papua yaitu “Mari Kitong Bicar Dulu”. Dialog ini melibatkan semua masyarakat

Papua baik yang berada di Papua maupun yang berada diluar di Papua serta pemerintah daerah. Dialog ini perlu dilaksanakan di 7 wilayah adat Papua agar dapat mengetahui tentang indikator Papua tanah damai yang ingin di bangun Papua dan mencapai pemahaman bersama tentang tanah damai. Selain dialog ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Papua, serta komitmen untuk memelihara Papua sebagai Tanah Damai.

Dalam pandangan LIPI, dialog yang dimaksudkan oleh Kemenkopolhukam yaitu melalui tatap muka antara pemimpin negara dan masyarakat bukanlah sebuah tahapan yang dapat digunakan sebagai jalan mencari solusi untuk Papua secara utuh. Hal ini disampaikan oleh peneliti senior Ibu Adriana Elizabeth bahwa sampai saat ini belum ada dialog yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat. Termasuk pertemuan tim 100 yang dilakukan pada tahun 1999 bukanlah dialog, itu hanyalah pertemuan yang menghasilkan sebuah kebijakan yaitu Otonomi Khusus Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang disignifikan antara pemahaman dialog yang dimaksudkan melalui 2 lembaga negara yang ditunjuk

negara untuk mencari solusi masalah Papua. Kemenkopolhukam memandang bahwa dialog saat ini sudah dilakukan dengan cara blusukan namun LIPI memandang bahwa belum ada dialog yang dilaksanakan untuk mencari solusi Papua.

Disisi lain, Organisasi Pro Referendum Komite Nasional Papua Barat menegaskan bahwa KNPB setuju dengan pelaksanaan dialog yang menjadi pembahasan di Papua saat ini karena dialog merupakan salah satu jalan yang dapat menyelesaikan kasus Papua namun dialog ini bukanlah dialog yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan mengajak organisasi pro referendum untuk berbicara dan mencari win-win solution. KNPB tidak akan pernah mengikuti jika tahapan dialog seperti demikian. Sebaliknya jika dialog dilaksanakan oleh pihak ketika dan mengundang pemerintah dan pro referendum untuk membicarakan pelaksanaan referendum atau penentuan nasib sendiri untuk Papua maka KNPB akan mengikuti. Penawaran tidak akan pernah berubah, organisasi Pro referendum tetap berdiri pada satu pendirian yaitu pelaksanaan referendum untuk melihat dan membuktikan hasil

pepera yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Dalam pandangan sembilan langkah strategis perencanaan strategis yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Ada empat langkah komunikasi strategis yang digunakan untuk melihat relevansi terhadap pelaksanaan dialog di Papua. Empat langkah perencanaan komunikasi strategis tersebut adalah Pemetaan Situasi, Berbicara dengan pemangku kepentingan, Visi dan Misi masa depan negara, dan mengembangkan rencana strategis dan taksis.

#### **a. Pemetaan Situasi**

Pemetaan terhadap situasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkopolhukam dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia namun hasil dari pemetaan situasi terhadap Papua tersebut masih berbeda karena pandangan terhadap sejarah Papua yang berbeda. Metode pendekatan yang digunakan juga masih berbeda yaitu pendekatan komunikasi konstruktif dan pendekatan komunikasi atau dialog Papua tanah damai. Ketidaksamaan pandangan ini telah menyebabkan strategi yang disusun tidak terarah dan ditolak oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu

penyebab ancaman terhadap integrasi bangsa.

#### **b. Berbicara dengan pemangku kepentingan**

Berdasarkan pandangan tentang dialog yang disampaikan diatas bahwa Presiden Indonesia sebagai pemegang kekuasaan telah melakukan komunikasi strategis melalui kunjungan dan pertemuan dengan kepala daerah serta tokoh masyarakat secara langsung. Komunikasi sebagai tindak lanjut untuk pembangunan di Papua. Menurut Kemenkopolhukam bahwa komunikasi yang dilakukan Presiden ini merupakan dialog vertikal yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Selain itu, Presiden juga sering mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk bertemu dengannya di Istana Presiden. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sebagian masyarakat masih menyeruhkan untuk referendum dan mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Presiden di Papua bukanlah kebutuhan masyarakat Papua.

Peneliti melihat bahwa komunikasi yang dibangun oleh Presiden adalah komunikasi berdasarkan kemauan

pemerintah atau kemauan searah bukan kemauan yang dihasilkan dari dialog. Kelompok pro referendum melihat pembangunan di Papua sebagai upaya untuk melakukan marginalisasi atas orang Papua. Kelompok pro referendum selalu datang dalam sebuah pemahaman bahwa masalah Papua bukanlah pembangunan melainkan masalah sejarah integrasi Papua dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat pendekatan militer yang pernah dilakukan. Perbedaan pandangan tentang berbicara dengan pemangku kepentingan ini telah menunjukkan bahwa setiap kelompok di dalam konflik ini memiliki kepentingan yang berbeda dan ingin memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing kelompok belum melakukan komunikasi yang strategis.

### **c. Visi dan Misi Masa Depan Negara**

Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa visi dan misi negara Indonesia adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta melindungi kedaulatan bangsa

Indonesia dari ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah mengarah kepada visi dan misi negara yaitu dialog yang diarahkan untuk pembangunan Papua dan bukan dialog politik yang mengarah kepada referendum.

Hal sejalan juga dilakukan oleh LIPI melalui dialog internal Papua, Papua Tanah Damai yaitu untuk menjamin perdamaian di Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Namun, hal ini berbeda dengan komunikasi yang diharapkan oleh kelompok pro referendum yaitu dialog untuk mempersiapkan referendum penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua yaitu dialog Politik. Ini tentunya bertentangan dengan visi dan misi negara sehingga komunikasi strategis tidak bisa dilakukan jika ada yang bertentangan. Dialog akan membahayakan keutuhan bangsa jika dialog tersebut tidak memperhatikan visi dan misi bangsa.

### **d. Mengembangkan Rencana Strategis dan Taktis**

Ketika komunikasi strategis tidak bisa dilakukan karena perbedaan dalam pemetaan situasi, komunikasi tidak dua arah antara pemerintah

sebagai pemangku kepentingan dan masyarakat, serta tidak bisa melakukan komunikasi dalam visi dan misi negara maka pengembangan rencana strategis dan taktis untuk masa depan Papua akan terhambat. Hal ini akan berpengaruh pada kepentingan nasional Indonesia yaitu menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti datang dalam sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan dialog Papua-Jakarta atau dialog Politik tidak relevan untuk dilaksanakan lagi karena menurut teori komunikasi strategi yang di pandang dari 4 perencanaan, dialog ini bertentangan dengan visi dan misi negara. Jika dilihat dalam teori dialog maka dialog ini adalah jenis dialog “*Positionn dialog*” atau dialog yang digunakan untuk menentukan posisi. Ketika pra pihak bertemu dan melakukan diskusi maka tujuannya adalah menentukan posisi artinya dialog politik Papua-Jakarta adalah dialog yang dilakukan untuk menentukan status politik Papua dalam wilayah kesatuan.

Dialog Politik Papua-Jakarta akan melahirkan sebuah konsekuensi baru bagi negara bahwa negara harus siap

untuk melakukan referendum. hal ini sebabkan oleh pandangan komunikasi strategis bahwa setiap pihak yang ingin melakukan dialog harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau semua orang setara dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga jika organisasi pro referendum meminta untuk pelaksanaan referendum atau penentuan nasib sendiri dengan *one man one vote* maka negara harus mengambil resiko tersebut.

Namun, disisi lain dialog yang selama ini dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah baik untuk menciptakan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah. Secara tidak langsung hal ini juga dapat mengikis angka etnonasionalisme di Papua. Ini yang disebut peneliti sebagai dialog strategis. Pemetaan situasi tetap dilakukan oleh pemerintah, pemerintah tetap membuka komunikasi dengan masyarakat, visi dan misi negara menjadi tujuan dialog ini maka pembangunan Indonesia dapat dimulai dari Indonesia dari timur.

### **Rekonstruksi Penyelesaian Konflik dan Rute Perdamaian Konflik Papua**

Konflik Integrasi di Papua merupakan salah satu masalah yang sangat konflik hal itu bisa di lihat di gambaran umum konflik yang telah dibahas oleh peneliti bahwa konflik yang terjadi di Papua ini mencakup semua konflik yang di tuliskan oleh Ichsan Malik dalam bukunya Resolusi Konflik jembatan perdamaian yaitu konflik hubungan, struktural, nilai, data, dan kepentingan. Hal itu berlanjut ketika hasil dari analisis peneliti bahwa dialog yang selama ini dibicarakan oleh pemerintah dan akademisi ternyata harus dibatasi. Dialog politik Papua-Jakarta tidak bisa dilakukan karena terjadi perbedaan kepentingan antara Jakarta dan kelompok Papua yang pro terhadap referendum.

Jika dialog Politik Papua-Jakarta ini dipaksakan maka Indonesia akan diperhadapkan dengan sebuah tantangan besar yaitu dialog difasilitasi oleh pihak ketiga dan tawaran pro referendum yang ditawarkan oleh kelompok pro referendum harus dilakukan. Hal tersebut yang menyebabkan dialog politik Papua-Jakarta tidak relevan untuk dilaksanakan dan penyelesaian konflik Papua harus di rekonstruksi. Rekonstruksi penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengubah dialog arah dialog Papua-Jakarta dari yang awalnya adalah dialog politik menjadi dialog pembangunan berkelanjutan atau dalam pandangan teori dialog dilakukan dialog *Human Relation Dialog* yang artinya para pihak yang berkonflik didudukkan secara bersama untuk penyamaan persepsi dan membangun sebuah kesepahaman antara para pihak serta rasa saling menghargai. Dialog ini bisa dilakukan untuk penentuan langkah kedepan agar pemerintah dan masyarakat tahu rencana yang ingin dilakukan kedepan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka melihat keseriusan pemerintah dalam pembangunan di Papua. Selain itu, kata berkelanjutan di tambahkan peneliti dalam dialog pembangunan Papua karena selama ini pembangunan yang dilakukan di Papua inkonsistensi. Dapat dilihat dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhono yang menyampaikan serius untuk menyelesaikan konflik Papua melalui beberapa statment mendukung dialog dan program Unit Percepatan Pembangunan

Papua dan Papua Barat namun program tersebut tidak secara langsung menyentuh masyarakat Papua bahkan program tersebut tidak berjalan secara berlanjut.

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi, keamanan dan, dan pembangunan. Terlihat bahwa ada kesungguhan dari pemerintah untuk melakukan komitmennya membangun dari infrastruktur serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua secara bertahap. Namun, pendekatan ini tidak mendapat perhatian lebih dari masyarakat Papua yang beranggapan bahwa Infrastruktur memang penting tetapi pemerintah harus memulai dari kebutuhan masyarakat bukan keinginan pemerintah. LIPI menyebutkan hal tersebut sebagai seremonial pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam membangun Papua namun pada kenyataannya pembangunan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat Papua.

2. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsilias. Komisi ini menjadi bagian dalam sebuah dialog strategis yang memegang peran sebagai pelaksana dialog *Problem Solving dialogue* atau dialog yang dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian konflik dengan cara mengorganisasi komunikasi setiap pihak secara baik sehingga dapat menemukan titik temu pihak yang berkonflik dan substansi yang harus diselesaikan agar konflik dapat segera berlalu dan menjadi damai. Hal ini harus dilakukan secara berani oleh pemerintah karena ini merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga integrasi Indonesia. Komisi Kebenaran ini ditugaskan untuk mencari fakta masa lalu tentang integrasi Papua dan sejarah pelanggaran HAM yang ada di Papua. Membuka semua slot yang selama ini dikunci untuk memperlihatkan wajah militer di Papua dan wajah Organisasi Papua Merdeka. Pelaksana dari komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini ditugaskan kepada tim terpadu yang bisa melihat konflik Papua secara objektif. Jika pemetaan

situasi bisa dilakukan oleh tim terpadu tersebut maka hasilnya baru didialogkan oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Membangun narasi positif untuk Papua. Narasi untuk Papua saat ini sangat penting, sudah saatnya stigma yang diberikan kepada orang Papua dirubah menjadi pandangan positif. Stigma seperti orang Papua pemalas, orang Papua berpikir belum maju dan tidak bisa bersaing, orang Papua tukang mabuk. Semua stigma yang diberikan dari pemerintah dan masyarakat selain Papua harus dirubah, dengan alasan hal ini memicu pemberian label negatif kepada orang Papua dan sebaliknya akan ada pertentangan dari masyarakat bahwa Papua bukan Indonesia.

Selanjutnya, masyarakat Indonesia perlu di edukasi untuk tidak melakukan rasis kepada masyarakat Papua, seperti konflik Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019. Ketika sekelompok masyarakat yang meneriakkan kata rasis kepada mahasiswa Papua. Hal tersebut menjadi sebuah momen untuk kelompok pro referendum

mengarahkan konflik hubungan ini menjadi konflik politik yang arahnya adalah meminta untuk referendum.

4. Memasukan wawasan nusantara dalam kurikulum pembelajaran di Papua. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk mempersiapkan masyarakat Papua menerima perbedaan yang ada. Secara umum dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia unik karena setiap suku bangsa memiliki perbedaan baik bentuk fisik dan tata bahasa. Namun, secara spesifik hal ini harus ditanamkan dari dalam kurikulum belajar kepada masyarakat Papua bahwa Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah negara yang terbentuk dari perbedaan bukan persamaan sehingga Bhineka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa. saat ini pemaknaan terhadap nusantara masih kurang sehingga masyarakat Papua masih banyak yang belum menerima perbedaan.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Papua menjadi salah satu daerah yang terjadi konflik vertikal lama dibanding beberapa daerah lain di Indonesia seperti Aceh dan Timor Leste.

Hal tersebut menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi yang dikenal sebagai provinsi rawan konflik Integrasi. Dialog menjadi satu kata kunci dalam penyelesaian konflik tersebut namun dalam perjalanannya, wacana dialog mendapatkan banyak penafsiran sehingga mengambat pelaksanaannya.

Dialog Politik Papua-Jakarta yang selalu disampaikan sebagai kata kunci dalam penyelesaian konflik Papua sudah tidak relevan untuk dilaksanakan di Papua karena menurut analisis peneliti, dialog ini tidak memenuhi unsur komunikasi strategis visi dan misi negara. Dialog ini hanya akan membenturkan 2 kepentingan antara pemerintah dan organisasi pro referendum dan tidak akan menemukan titik tengahnya. Sehingga dialog Papua-Jakarta akan menghasilkan ancaman disintegrasi bangsa.

Saat ini pemerintah, peneliti, dan kelompok pro referendum masih berdiri pada rute masing-masing untuk menemukan resolusi konflik Papua. Pemerintah dengan dialog substansial yang diarahkan untuk pembangunan Papua, LIPI dengan dialog Papua tanah damai, dan Pro Referendum dengan dialog menuju referendum. hal tersebut telah mengarahkan konflik Papua ke arah disintegrasi karena dialog Papua-Jakarta

masih menjadi bahasan dan selalu di wacanakan untuk dilakukan. Jika dialog Papua Jakarta dilaksanakan maka pemerintah dan organisasi pro referendum akan duduk bersama dan difasilitasi pihak ketiga atau mediator dari negara lain. Posisi tawar dalam dialog ini tentu saja akan mengarah kepada referendum karena pernyataan dari organisasi pro referendum jelas bahwa permintaan referendum yang mereka tawarkan merupakan keputusan final kelompok referendum.

Dari hasil penelian ini maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan nasional, yaitu Dalam menghadapi konflik di Papua, sudah saatnya dilakukan rekonstruksi untuk resolusi konflik Papua. Rute yang saat ini digunakan untuk menyelesaikan konflik belum diarahkan secara tepat sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan tidak satu pintu. Hal tersebut mengantarkan peneliti untuk merekomendasikan rute perdamaian baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik integrasi di Papua.

Rute tersebut dapat dimulai dari pembentukan komisi kebenaran dan Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai tim pencari fakta.

Tim yang dibentuk ini adalah tim terpadu yang mampu untuk melihat pelanggaran HAM masa lalu secara netral dan TIM tersebut mampu untuk membuka ruang dialog agar kasus tersebut tidak berakhir di pengadilan HAM tetapi bisa di giring ke arah rekonsiliasi agar berakhir dengan kata damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat ditugaskan sebagai komisi yang akan menangani dialog strategis Papua untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dialog strategis berarti dialog yang berada didalam koridor visi dan misi negara. hal ini berarti komisi ini memiliki tanggung jawab untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Memasukan wawasan nusantara di kurikulum pembelajaran, ini penting untuk dilakukan agar pembentukan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dapat dimulai dari bangku sekolah dasar bahkan pra sekolah atau PAUD. Hal ini untuk mengantisipasi pengaruh negatif yang datang pada saat seorang pemuda Papua mulai menginjak bangku SMP dan SMA serta bangku kuliah dan di doktrin dengan senior-senior untuk harus memiliki ideologi Papua Merdeka. Selain itu, dampak dari wawasan nusantara ini baik jika dimasukan dalam kurikulum

karena dapat mempersiapkan pemimpin masa depan yang negarawan dan cinta kepada Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Badan Pusat Statistik. 2016. *Papua Dalam Angka*. Jayapura: BPS PAPUA.

Commander's Handbook. 2010. *Strategic Communication and Communication strategic" version 3.0 US Joint forces Command*. Joint Warfighting Ceter. (A-1)-(A-3).

Grant, Cendric and Kirton, Mark. 2007. *Governance, Conflict Analysis and Conflict Resolution*. Jamaica: Ian Randle Publisher hlm 417

Kementrian Pertahanan. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta : Kementrian Pertahanan.

Materai, Bernarda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Asli Papua*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Nawawi, Hadari & Martini Hadari. 2006 *Intrumen dan Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm 98

Paul, Christoper. 2012. *Strategic Communication : Origins, Concepts and Current Debates*. Santa Barbara: Preeger.

Pekey, Frans. 2018. *Papua Mencari Jalan Perdamaian, Telah Resolusi Konflik di Bumi Cenderawasih*. Jakarta : Gramedia.

Setiko, Panji. 2015. *Pendidikan Pancasila* Jakarta : Gramedia Widiasarana.

Sugiyono. 2015. *Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta .

Usbon, Robin. 2019. *Masyarakat Papua Bukanlah Indonesia*. Papua : Majalah Weko.

### **Jurnal**

Hallahan, Kirsk. Derina Holtzhausen, Betteke van Rules, Dejan Verticic, and Krishnamurthy Sriramesh. 2007. "Defining Strategic Communication". *International Journal of Strategic Comunication* 2007.

Indonesian Institute of Science (LIPI). 2001. Papua Peace Land. *Jurnal The Campaign For Papua Peace Network* 2001 Vol. 21.

Persaud, Ganga and Turner, Trevor. (2007). "Education and conflict resoution For Democratization, Economic Development and Governence i Guyana". Jamaica : Ian Randle Publisher.

Widjojo, Muridan. 2011. "Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik". *Jurnal Penelitian Transisi Demoktrasi di Indonesia*. Jakarta.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

### **Website**

Darmono. 2019. Menakar Wacana Dialog. Dalam <https://kolom.tempo.co/read/1243954/menakar-wacana-dialog-papua/full&view=ok>. 21 September 2019, diakses pada 19 Januari 2020.

Idjie, Demianus. 2014. Otsus Plus, Kemerdekaan Papua 95%. Dalam <https://regional.kompas.com/read/>

2014/01/22/0843019/Otsus.Plus.95.Persen Kemerdekaan Wargapapua, 22 Januari 2014, Diakses pada tanggal 28 September 2019.

Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia. 2011. Papua Road Map : Bagian Perjalanan Damai. Dalam [www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/568-papua-road-map-bagian-perjalanan-damai-papua](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/568-papua-road-map-bagian-perjalanan-damai-papua).. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 23.00

Memoria Passionis ke Forero Sejarah Politik Papua. Dalam <https://docplayer.info/54705127-Dari-memoria-passionis-ke-foreri-sejarah-politik-papua.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 17:00

West Papua: A History Of Exploitation: <http://www.aljazeera.com/indept/opinion/2011/08/201182814172453998.html> , di tulis ulang dalam buku merancang demokrasi, Indonesia pasca reformasi, Priyono, Jakarta, 2014 Halaman 35